



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Lt, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tertanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 26 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Anak 1, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat, 25 Juni 2000, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: SLTP, yang sekarang anak tersebut sudah menikah, Anak 2, Nik: - , Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat, 25 September 2007, Jenis Kelamin: laki - laki, Pendidikan: SLTP , yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Pertengahan bulan Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
 - o Tergugat berbohong kepada Penggugat seperti Tergugat membawa pergi uang hasil pinjaman di bank dan tidak bertanggung jawab atas membayar pinjaman tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Februari 2024 Penggugat memberikan arahan dan nasihat kepada Tergugat untuk bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman di bank tersebut tetapi Tergugat tidak mendengarkan arahan dan nasihat tersebut melainkan marah - marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat telah menikah sirih dengan perempuan lain yang bernama : Lili yang Penggugat ketahui langsung dari cerita orang lain;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan telah berpisah selama 10 bulan, Tergugat tinggal di Desa Talang Asal, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah pergi dari alamat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Lt



Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat Tergugat sejak akhir tahun 2022, disebabkan Tergugat tidak transparan masalah keuangan serta sering berbohong kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah pergi dari alamat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Lt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Pahmuddin, M. H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M. Iqbal, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis

Drs. H. Pahmuddin, M. H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I **Kuala Akbar Andalas, S.H.I.**
Panitera Pengganti

M. Iqbal, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T : Rp	
	20.000,00	
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
d.	Pencabutan : Rp	10.000,00
2.	Biaya proses : Rp	80.000,00
3.	Panggilan : Rp	44.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	204.000,00
(dua ratus ribu empat rupiah).		

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Lt